

Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif: Strategi Baru Mencegah Kekerasan di Pesantren Mamba'ul Ulum

Faridatul Hasanah¹, Muhammad Husni²

^{1,2}Program Pascasarjana, Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: faridaashsyarofi@gmail.com¹, husni@alqolam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi manajemen kepengasuhan asrama dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan bebas dari kekerasan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem pengawasan dari pola hierarkis-tradisional berbasis senioritas menuju Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif mampu menurunkan risiko kekerasan dan perundungan secara signifikan. Implementasi model tersebut didukung oleh komitmen kuat dewan kiai, pembatasan kewenangan Dewan Santri dalam penegakan disiplin, pembentukan Komite Independen Penanganan Kekerasan, serta penerapan mekanisme pelaporan anonim. Integrasi prinsip hifzh al-nafs dengan pendekatan *Agile Governance* menghasilkan tata kelola asrama yang lebih humanis, transparan, dan akuntabel tanpa menghilangkan karakter tradisional pesantren. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Manajemen Pendidikan Agama Islam serta kontribusi praktis berupa model tata kelola asrama yang dapat dijadikan rujukan bagi pesantren dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Agile Governance*, Manajemen Kepengasuhan, Pesantren Ramah Anak, Zero Vulnerability.

ABSTRACT

This study examines the reconstruction of dormitory caregiving management in fostering a safe and violence-free Islamic educational environment at Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytic case study design, data were collected through in-depth interviews, passive participant observation, and document analysis. The data were subsequently analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the transformation from a seniority-based hierarchical supervision system to a Collegial-Mitigative Caregiving Governance Model significantly reduced the risks of violence and bullying. The effectiveness of this model is supported by the commitment of the kiai council, the limitation of disciplinary authority exercised by the Student Council, the establishment of an Independent Violence Prevention Committee, and the implementation of an anonymous reporting mechanism. The integration of the Islamic principle of hifzh al-nafs (protection of life) with an Agile Governance approach has fostered a more humane, transparent, and accountable dormitory management system while preserving the pesantren's traditional identity. This study contributes theoretically to the advancement of Islamic Educational Management and offers a practical governance framework that may serve as a reference for Islamic boarding schools seeking to create safer and more sustainable educational environments.

Keywords: Agile Governance, Caregiving Management, Child-Friendly Pesantren, Zero Vulnerability.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, pelestarian nilai-nilai moral, serta transmisi tradisi keilmuan Islam (*tafaqquh fi al-din*). Pengakuan terhadap posisi strategis tersebut semakin kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Husni, 2020). Sebagai subkultur pendidikan yang khas, pesantren menerapkan sistem pendidikan berasrama selama dua puluh empat jam yang mengintegrasikan proses pembelajaran formal dengan pembinaan karakter melalui kehidupan sehari-hari santri. Karakteristik ini memberikan peluang besar bagi internalisasi nilai-nilai keislaman, tetapi pada saat yang sama berpotensi melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara santri senior dan junior apabila tidak dikelola secara akuntabel (Raharjo, 2022).

Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Agama Islam (PAI), efektivitas penyelenggaraan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan proses pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kepengasuhan yang mengatur kehidupan santri di lingkungan asrama. Oleh karena itu, manajemen kurikulum dan manajemen kepengasuhan harus berjalan secara terintegrasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Secara normatif, tata kelola kepengasuhan pesantren perlu berlandaskan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai fondasi etis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *Safe School Model* yang menempatkan keamanan dan kesejahteraan peserta didik sebagai indikator utama mutu lembaga pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan institusi pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui kemampuannya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan (Solehuddin & Budiman, 2024).

Dari perspektif manajemen, George R. Terry (1972) menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) secara terpadu. Dalam konteks pesantren, implementasi fungsi-fungsi tersebut harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Husni, 2021). Oleh sebab itu, tata kelola kepengasuhan asrama tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembinaan kedisiplinan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin perlindungan santri dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan pesantren (Thoah & Mu'ammam, 2023).

Di tengah perannya sebagai lembaga pembentukan karakter, pesantren masih menghadapi tantangan berupa munculnya praktik kekerasan dan perundungan antar-santri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut sering kali berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan dan tingginya dominasi budaya senioritas dalam tata kelola asrama. Dalam banyak kasus, kewenangan penegakan

disiplin didelegasikan secara luas kepada santri senior tanpa pengawasan yang memadai dari pengasuh atau pembina asrama, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan otoritas (Zulkifli & Yusuf, 2025).

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan. Disfungsi tata kelola kepengasuhan dapat melemahkan legitimasi sosial pesantren apabila tidak segera direspons melalui reformasi kelembagaan yang lebih adaptif dan akuntabel (Raharjo, 2022). Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola kepengasuhan yang mampu meminimalkan berbagai bentuk kerentanan terhadap kekerasan dan perundungan di lingkungan asrama. Upaya tersebut menjadi penting untuk mewujudkan kondisi Zero Vulnerability, yaitu sistem kepengasuhan yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi kekerasan secara efektif melalui mekanisme pengawasan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada perlindungan santri.

Kajian mengenai kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Fauzi dan Rohman (2022) mengidentifikasi budaya senioritas dan lemahnya standar operasional kepengasuhan sebagai faktor utama yang memicu kekerasan di asrama. Hidayat dkk. (2023) menyoroti aspek psikologis dengan menunjukkan bahwa lingkungan asrama yang tertutup dapat mempercepat penyebaran perilaku agresif antarsantri. Sementara itu, Maimunah (2024) menekankan pentingnya implementasi konsep Pesantren Ramah Anak melalui penguatan regulasi perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Penelitian lain dilakukan oleh Anwar dan Siregar (2025) yang mengkaji kepemimpinan spiritual kiai dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, sedangkan Kurniawan (2025) menganalisis dampak perundungan terhadap motivasi belajar santri. Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek psikologis, normatif, atau dampak perundungan terhadap peserta didik. Kajian yang secara khusus membahas rekonstruksi tata kelola kepengasuhan asrama melalui pendekatan manajerial dan tata kelola kelembagaan masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa minimnya studi yang mengkaji transformasi sistem pengawasan asrama dari pola berbasis senioritas menuju model tata kelola yang lebih kolegial, akuntabel, dan berorientasi pada mitigasi risiko. Selain itu, integrasi konsep *Agile Governance* dengan sistem kepengasuhan pesantren untuk mewujudkan Zero Vulnerability belum banyak dieksplorasi dalam kajian Manajemen Pendidikan Agama Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada formulasi Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif yang mengintegrasikan nilai kepemimpinan profetik dengan prinsip manajemen risiko modern. Model ini menawarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi, tetapi juga pada restrukturisasi kewenangan kepengasuhan, pembentukan mekanisme pengawasan

independen, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman bagi santri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori Manajemen Pendidikan Agama Islam sekaligus menawarkan model praktis yang dapat diadaptasi oleh pesantren dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo pada tahun 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik kelembagaan yang unik serta keberhasilan pesantren dalam melakukan reformasi internal terhadap sistem kepengasuhan asrama. Sebagai lembaga dengan jumlah santri yang besar, pesantren ini berhasil mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif melalui restrukturisasi tata kelola kepengasuhan berbasis kesadaran dan inisiatif internal kelembagaan. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena masih relatif jarang ditemukan dalam literatur tata kelola pesantren.

Keberhasilan pesantren dalam mengurangi potensi konflik dan perundungan melalui reorganisasi sistem kepengasuhan menunjukkan adanya praktik baik (*best practice*) yang layak dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rekonstruksi manajemen kepengasuhan asrama di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses transformasi tersebut, serta merumuskan model tata kelola kepengasuhan yang efektif dalam mewujudkan Zero Vulnerability terhadap kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis (*descriptive-analytic case study*). Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses rekonstruksi tata kelola kepengasuhan asrama dalam upaya mewujudkan lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari kekerasan. Melalui pendekatan studi kasus, fenomena yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dalam konteks alaminya tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi lapangan (Yin, 2018).

Pendekatan ini relevan untuk mengungkap dinamika kebijakan internal, pola interaksi antaraktor, serta implementasi sistem pengawasan yang berkembang dalam lingkungan pesantren. Selain itu, studi kasus memberikan ruang bagi penyajian deskripsi mendalam (*thick description*) mengenai proses perubahan tata kelola yang terjadi di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo (Creswell & Creswell, 2018).

Subjek penelitian ini adalah sistem manajemen kepengasuhan asrama di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kepengasuhan (Sugiyono, 2019). Informan utama terdiri atas Pengasuh Pondok Pesantren (kiai), Kepala Bidang Kepengasuhan Asrama, anggota Komite Independen Penanganan Kekerasan, dan pengurus Dewan Santri. Untuk memperoleh informasi

yang lebih komprehensif serta memperkuat validitas data, penelitian ini juga melibatkan sejumlah santri dari berbagai tingkat dan kamar sebagai informan pendukung melalui teknik snowball sampling (Sugiyono, 2019).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai kebijakan kepengasuhan, proses restrukturisasi organisasi, dinamika implementasi program, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem tata kelola baru. Kedua, observasi partisipatif pasif (passive participant observation) dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kepengasuhan dan pengawasan di lingkungan asrama. Observasi difokuskan pada pola interaksi antara santri senior dan junior, mekanisme pengawasan harian, serta pelaksanaan program mitigasi risiko kekerasan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen kelembagaan, meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) kepengasuhan, tata tertib santri, struktur organisasi, arsip laporan pelanggaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sistem pengelolaan asrama.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang bertugas mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan instrumen tambahan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, catatan lapangan, dan perangkat perekam digital. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui penghimpunan seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh dikondensasikan melalui proses seleksi, penyederhanaan, kategorisasi, dan pengelompokan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun matriks untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang guna memastikan konsistensi antara temuan empiris dan kerangka teori yang digunakan.

Keabsahan data dijaga melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti kiai, ustaz, pengurus, dan santri. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengonfirmasi kesesuaian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur ini diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan keandalan temuan penelitian sebagaimana direkomendasikan oleh Yin (2018) dan Sugiyono (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo, salah satu lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan formal dan kepengasuhan asrama secara terpadu. Lembaga ini mengelola pendidikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dengan jumlah santri yang relatif besar serta berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

Secara organisatoris, tata kelola pesantren melibatkan dewan kiai sebagai pengambil kebijakan tertinggi, ustaz pembina sebagai pelaksana kepengasuhan harian, dan Dewan Santri yang berperan membantu pengelolaan kedisiplinan asrama. Kompleksitas interaksi sosial yang muncul dalam lingkungan berasrama selama dua puluh empat jam menuntut tersedianya sistem pengawasan yang efektif guna mencegah munculnya konflik, perundungan, maupun tindakan kekerasan antarsantri. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi dilakukannya rekonstruksi sistem kepengasuhan yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan santri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo telah melakukan transformasi mendasar pada sistem kepengasuhan asrama. Sistem yang sebelumnya berorientasi pada pola pengawasan hierarkis berbasis senioritas direkonstruksi menjadi Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif yang menempatkan perlindungan santri sebagai prioritas utama.

Perubahan tersebut ditandai dengan pembentukan Komite Independen Penanganan Kekerasan yang berada di luar struktur Dewan Santri dan bertanggung jawab langsung kepada pengasuh pesantren. Kehadiran komite ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal sekaligus ruang aman bagi santri untuk menyampaikan laporan terkait tindakan kekerasan, intimidasi, maupun pelanggaran lainnya tanpa takut mengalami tekanan atau balasan dari pihak tertentu.

Selain itu, kewenangan Dewan Santri dalam penegakan disiplin dibatasi secara jelas. Pengurus santri tidak lagi memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi secara langsung, melainkan hanya bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan pelanggaran. Seluruh proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan komite independen dan ustaz pembina sehingga proses penegakan disiplin menjadi lebih akuntabel dan terukur.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Kepengasuhan Sebelum dan Sesudah Rekonstruksi

Aspek	Sistem Tradisional	Model Kolegial-Mitigatif
Otoritas Pengawasan	Berpusat pada senior	Berbasis kolaborasi ustaz dan komite
Penegakan Disiplin	Cenderung punitif	Edukatif dan terkontrol
Mekanisme Pelaporan	Terbuka dan rentan intimidasi	Anonim dan terlindungi
Orientasi Pengawasan	Kepatuhan berbasis ketakutan	Keamanan dan perlindungan santri

Akuntabilitas

Terbatas

Transparan dan terukur

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap implementasi model tata kelola baru. Pengasuh pesantren menegaskan bahwa reformasi kepengasuhan dilandasi oleh komitmen untuk mengimplementasikan prinsip *hifzh al-nafs* sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan pesantren dalam melindungi seluruh santri.

Informan dari unsur kepengasuhan menjelaskan bahwa sistem baru berhasil mengurangi praktik penyalahgunaan kewenangan yang sebelumnya berpotensi muncul akibat dominasi senioritas. Pengurus Dewan Santri kini berperan sebagai mitra pembinaan, bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam memberikan hukuman.

Sementara itu, santri menyatakan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan anonim meningkatkan rasa aman dalam kehidupan asrama. Mereka merasa memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan tindakan yang merugikan tanpa khawatir mengalami tekanan sosial maupun intimidasi dari pelaku.

Temuan lain menunjukkan bahwa setiap laporan yang masuk diproses melalui mekanisme verifikasi berlapis sebelum ditindaklanjuti. Prosedur tersebut memperkuat objektivitas pengambilan keputusan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penanganan kasus.

Observasi lapangan memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengawasan dan interaksi sosial di lingkungan asrama. Pada periode yang sebelumnya dianggap rawan terjadinya perundungan, seperti setelah kegiatan malam, menjelang waktu istirahat, dan saat pergantian aktivitas harian, terlihat adanya pengawasan yang lebih terstruktur melalui kolaborasi antara ustaz pembina dan pengurus santri.

Interaksi antara santri senior dan junior juga menunjukkan perubahan yang positif. Hubungan yang sebelumnya cenderung berorientasi pada kontrol dan kepatuhan kini berkembang menjadi pola pendampingan yang lebih edukatif. Santri senior lebih banyak terlibat dalam kegiatan pembimbingan belajar, pendampingan ibadah, dan penguatan karakter sehingga fungsi kepemimpinan tetap berjalan tanpa menghadirkan tekanan psikologis bagi santri junior.

Selain aspek sosial, pesantren juga melakukan penyesuaian terhadap tata ruang asrama untuk mendukung efektivitas pengawasan. Penataan ruang yang lebih terbuka memungkinkan pembina melakukan pemantauan secara lebih optimal dan mengurangi peluang terjadinya tindakan yang tidak terkontrol.

Analisis terhadap dokumen kelembagaan menunjukkan bahwa pesantren telah melakukan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kepengasuhan dan tata tertib santri. Regulasi baru memuat klasifikasi pelanggaran secara lebih rinci

beserta mekanisme penanganan dan bentuk sanksi edukatif yang dapat diterapkan sesuai tingkat pelanggaran.

Salah satu temuan penting adalah adanya ketentuan yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal dalam proses pembinaan. Regulasi tersebut juga memuat sanksi yang jelas bagi pengurus maupun santri yang terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap santri lain.

Dokumen evaluasi internal menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah laporan konflik dan gesekan antarsantri setelah penerapan model tata kelola baru. Temuan ini mengindikasikan bahwa rekonstruksi sistem kepengasuhan tidak hanya menghasilkan perubahan struktural, tetapi juga berdampak pada terciptanya lingkungan asrama yang lebih aman, kondusif, dan berorientasi pada perlindungan santri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif berhasil memperkuat akuntabilitas pengawasan, meningkatkan rasa aman santri, serta mendukung terwujudnya lingkungan pesantren yang lebih humanis dan bebas dari praktik kekerasan maupun perundungan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo dalam menekan risiko kekerasan dan perundungan tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari rekonstruksi tata kelola kepengasuhan yang dirancang secara sistematis. Perubahan dari pola pengawasan berbasis senioritas menuju Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif menandai pergeseran paradigma pengelolaan asrama dari pendekatan yang berorientasi pada kontrol menuju pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa akar persoalan kekerasan di lingkungan pesantren tidak semata-mata berasal dari perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi yang memberikan ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ketika otoritas pengawasan terpusat pada kelompok tertentu tanpa mekanisme kontrol yang memadai, potensi munculnya tindakan koersif menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan Dewan Santri dan pembentukan Komite Independen Penanganan Kekerasan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pengawasan yang lebih akuntabel dan berimbang.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa reformasi kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Dekonsentrasi kewenangan yang diterapkan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo berhasil mengurangi dominasi budaya senioritas sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap santri yang rentan mengalami intimidasi maupun kekerasan.

Keberhasilan implementasi Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya komitmen kuat dari pimpinan pesantren sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Dalam konteks organisasi pesantren, legitimasi kiai memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan budaya organisasi. Dukungan penuh dari pengasuh pesantren menjadikan kebijakan anti-kekerasan tidak hanya dipandang sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari nilai keagamaan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga pesantren. Kedua, penerapan sistem pelaporan anonim terbukti meningkatkan akses santri terhadap mekanisme perlindungan. Sistem ini memberikan ruang yang aman bagi santri untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran tanpa khawatir mengalami tekanan sosial ataupun intimidasi dari pihak yang dilaporkan. Dengan demikian, proses deteksi dan penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Ketiga, integrasi pengawasan antara ustaz pembina, komite independen, dan pengurus santri menciptakan sistem kontrol yang lebih efektif dibandingkan model pengawasan yang hanya bertumpu pada satu aktor. Pola pengawasan kolektif ini memungkinkan terjadinya checks and balances sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dari perspektif Manajemen Pendidikan Agama Islam, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan menciptakan lingkungan pesantren yang aman merupakan hasil dari implementasi fungsi manajemen yang berjalan secara terpadu. Pada tahap perencanaan (*planning*), pesantren menyusun regulasi, prosedur penanganan kasus, serta mekanisme mitigasi risiko yang jelas. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), dibentuk struktur kelembagaan baru yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem pengawasan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan (*actuating*) diwujudkan melalui pembinaan karakter, pengawasan rutin, dan penerapan sistem pelaporan. Adapun tahap pengawasan (*controlling*) dilakukan melalui evaluasi berkala, verifikasi laporan, dan pengambilan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Implementasi keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kepengasuhan merupakan bagian integral dari Manajemen Pendidikan Agama Islam. Pengasuhan tidak dapat diposisikan hanya sebagai aktivitas pendampingan santri, tetapi harus dipahami sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya organisasi yang aman, sehat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah keberhasilan integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan pendekatan tata kelola modern. Model yang diterapkan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo menunjukkan bahwa prinsip hifzh al-nafs dapat dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan kelembagaan yang konkret melalui sistem pengawasan, perlindungan, dan mitigasi risiko. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa modernisasi tata kelola pesantren tidak harus menghilangkan identitas tradisionalnya. Sebaliknya, nilai-nilai keislaman dapat menjadi fondasi normatif yang memperkuat efektivitas sistem manajemen modern.

Integrasi tersebut menghasilkan model kepengasuhan yang tidak hanya responsif terhadap berbagai risiko sosial, tetapi juga tetap mempertahankan karakter pendidikan pesantren yang berbasis pembinaan akhlak dan pembentukan karakter. Selain itu, karakteristik model yang fleksibel, responsif, dan berbasis penyelesaian masalah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *Agile Governance*. Struktur organisasi yang lebih adaptif memungkinkan pesantren merespons berbagai potensi konflik secara cepat, sehingga risiko kekerasan dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Penelitian ini melengkapi berbagai studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada identifikasi faktor penyebab kekerasan atau dampak perundungan terhadap santri. Berbeda dengan penelitian terdahulu, studi ini menawarkan model tata kelola yang dapat diimplementasikan secara langsung sebagai strategi preventif dalam pengelolaan asrama pesantren. Kontribusi utama penelitian terletak pada pengembangan Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan nilai kepemimpinan Islam, perlindungan anak, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi pendidikan. Model ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan di pesantren tidak cukup dilakukan melalui pendekatan regulatif semata, tetapi memerlukan perubahan struktur organisasi dan budaya kepengasuhan secara menyeluruh.

Secara praktis, model ini dapat dijadikan rujukan bagi pesantren lain dalam membangun sistem kepengasuhan yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Temuan penelitian juga memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan, khususnya dalam penyusunan standar tata kelola kepengasuhan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan hak dan kesejahteraan santri. Dengan demikian, Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi kekerasan, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola pesantren serta mendukung terwujudnya lingkungan pendidikan Islam yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem kepengasuhan asrama dari pola hierarkis berbasis senioritas menuju Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif mampu menciptakan lingkungan pesantren yang lebih aman, humanis, dan akuntabel. Transformasi tersebut dilakukan melalui restrukturisasi kewenangan kepengasuhan, pembentukan Komite Independen Penanganan Kekerasan, penerapan sistem pelaporan anonim, serta penguatan pengawasan kolaboratif antara pengasuh, pembina, dan pengurus santri. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa integrasi nilai *hifzh al-nafs* dengan pendekatan *Agile Governance* mampu menghasilkan mekanisme tata kelola yang efektif dalam mencegah dan menangani potensi kekerasan maupun perundungan di lingkungan asrama. Model ini membuktikan bahwa perlindungan santri dapat diwujudkan tanpa

menghilangkan karakteristik tradisional pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis pembinaan akhlak dan kehidupan berasrama.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian Manajemen Pendidikan Agama Islam melalui pengembangan konsep tata kelola kepengasuhan yang mengintegrasikan kepemimpinan profetik, perlindungan anak, dan manajemen risiko kelembagaan. Secara praktis, Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif dapat dijadikan rujukan bagi pesantren dalam membangun sistem kepengasuhan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan santri. Hasil penelitian memberikan implikasi penting bagi pengembangan Manajemen Pendidikan Agama Islam, khususnya pada aspek tata kelola kepengasuhan asrama. Temuan ini menegaskan bahwa sistem pengasuhan tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas pendampingan santri, melainkan sebagai subsistem strategis yang berperan dalam membentuk budaya organisasi, menjamin perlindungan peserta didik, dan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga pendidikan Islam.

Bagi pengelola pesantren, penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun sistem pengawasan yang akuntabel melalui distribusi kewenangan yang proporsional, penguatan mekanisme pelaporan, dan pengembangan struktur pengawasan independen. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penyusunan standar tata kelola kepengasuhan yang menempatkan perlindungan santri sebagai indikator utama kualitas pengelolaan pesantren. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi Model Tata Kelola Kepengasuhan Kolegial-Mitigatif pada berbagai tipe pesantren dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda. Pengujian komparatif diperlukan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, adaptabilitas, dan replikabilitas model pada pesantren dengan kapasitas sumber daya yang beragam.

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan pendekatan mixed methods guna mengukur dampak model secara lebih komprehensif melalui kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Kajian lanjutan juga diperlukan untuk menganalisis hubungan antara tata kelola kepengasuhan, kesejahteraan psikologis santri, serta kualitas budaya organisasi pesantren dalam jangka panjang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang melibatkan partisipasi manusia. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, peneliti memperoleh izin resmi dari Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Banjarejo sebagai lokasi penelitian. Seluruh informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta prosedur penelitian dan berpartisipasi secara sukarela setelah memberikan persetujuan (informed consent).

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan partisipan, identitas seluruh informan disamarkan serta dijaga kerahasiaannya selama proses penelitian maupun publikasi hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik serta dikelola sesuai prinsip kerahasiaan penelitian kualitatif.

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest), baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, yang berpotensi memengaruhi proses pengumpulan data, analisis, interpretasi temuan, maupun penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., & Siregar, M. H. (2025). Kepemimpinan spiritual kiai dalam manajemen krisis kelembagaan pondok pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.14421/jpi.2025.141-04>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Rohman, M. (2022). Dekonstruksi budaya senioritas: Studi evaluasi terhadap standar operasional prosedur kepengasuhan asrama pesantren. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), 189–204. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v17i2.15234>
- Hidayat, R., Hartono, B., & Wijaya, C. (2023). Dynamic peer-group interactions and bullying behavior in boarding schools: A cognitive-psychological approach. *Children and Youth Services Review*, 148, 106890. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106890>
- Husni, M. (2020). Arah baru pendidikan pesantren pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 26(2), 265–278. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.842>
- Husni, M. (2021). Transformasi manajemen kurikulum pondok pesantren di era disrupsi sosial. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 89–102. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.191-07>
- Kurniawan, D. (2025). Dampak perundungan terhadap motivasi belajar santri pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tatsqif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*, 23(1), 12–27. <https://doi.org/10.20414/jtq.v23i1.9123>
- Maimunah, S. (2024). Pesantren Ramah Anak: Kontestasi regulasi pemerintah dan kemandirian otoritas institusi total tradisional. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 31(1), 102–125. <https://doi.org/10.36712/sdi.v31i1.29431>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prasetyo, A., & Rahayu, S. (2023). Restructuring the boarding school management: An *Agile Governance* framework to eliminate institutional violence. *Heliyon*, 9(4), e15241. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15241>
- Raharjo, M. (2022). Relasi kuasa dan kekerasan laten dalam pengasuhan lembaga pendidikan Islam tradisional di Asia Tenggara. *Uloomuna: Journal of Islamic Studies*, 26(2), 311–334. <https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.512>

- Solehuddin, M., & Budiman, N. (2024). Islamic prophetic leadership concepts in addressing student bullying behaviors. *Journal of Beliefs & Values*, 45(2), 174–189. <https://doi.org/10.1080/13617672.2024.2315482>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, A., & Timotius, K. H. (2023). Standardisasi akreditasi kepengasuhan asrama sehat: Perspektif manajemen risiko organisasi pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 32(3), 241–255. <https://doi.org/10.21831/jmp.v32i3.45121>
- Suryadi, K. (2024). Character education through peer-tutoring patterns in Indonesian Islamic boarding schools. *British Journal of Religious Education*, 46(3), 289–302. <https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2341109>
- Terry, G. R. (1972). *Principles of Management*. Richard D. Irwin.
- Thoha, M., & Mu'ammam, M. A. (2023). Akuntabilitas tata kelola pondok pesantren dalam implementasi jaminan perlindungan anak. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 145–172. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.145-172>
- Wahid, A., & Bashori, B. (2024). Manajemen pengawasan 24 jam berbasis sistem pelaporan anonim digital di lingkungan madrasah berasrama. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 112–126. <https://doi.org/10.30868/jmpi.v9i02.4121>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zuhdi, M. (2022). Challenging traditional hierarchy: Student organization reforms within Indonesian Islamic boarding schools. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 33(4), 413–431. <https://doi.org/10.1080/09596410.2022.2139401>
- Zulkifli, Z., & Yusuf, M. (2025). Rekonstruksi hidden curriculum asrama dalam mereduksi tindakan koersif senioritas di pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(2), 201–215. <https://doi.org/10.36668/jpii.v9i2.641>